

Pancasila: Dinamika Musyawarah dan Negosiasi Ideologis Golongan Kebangsaan dan Islam (1945)

Ramadhani Lailatul Maghfiroh

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ramadhanilailatul074@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, musyawarah, state building, negosiasi ideologis, golongan kebangsaan, golongan islam, BPUPKI 1945.

Keywords:

Pancasila, deliberation, state building, ideological negotiations, national groups, Islamic groups, BPUPKI 1945.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis dinamika musyawarah dan proses state building dalam perumusan Pancasila pada tahun 1945, dengan fokus pada negosiasi ideologis antara golongan kebangsaan dan golongan Islam di Indonesia. Melalui kajian historis terhadap sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), artikel ini menunjukkan bagaimana musyawarah menjadi mekanisme utama untuk mencapai konsensus nasional. Negosiasi ini melibatkan kompromi antara visi kebangsaan sekuler Sukarno dan Hatta dengan tuntutan Islamisasi dari golongan Islam, yang akhirnya menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif. Analisis ini didasarkan pada sumber primer seperti pidato-pidato sidang BPUPKI dan literatur sejarah terkait, menekankan pentingnya musyawarah dalam membangun negara yang stabil.

ABSTRACT

This article analyzes the dynamics of deliberation (musyawarah) and state-building processes in the formulation of Pancasila in 1945, focusing on ideological negotiations between the nationalist and Islamic groups in Indonesia. Through a historical examination of the sessions of the Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), this article demonstrates how musyawarah served as the primary mechanism for achieving national consensus. The negotiations involved compromises between the secular nationalist vision of Sukarno and Hatta and the Islamization demands from the Islamic group, ultimately resulting in Pancasila as an inclusive state foundation. This analysis is based on primary sources such as BPUPKI session speeches and related historical literature, emphasizing the importance of musyawarah in building a stable state.

Pendahuluan

Perumusan Pancasila pada tahun 1945 merupakan momen krusial dalam sejarah Indonesia, di mana proses musyawarah dan negosiasi ideologis memainkan peran sentral dalam pembentukan dasar negara (Anderson, 2006). Pancasila, sebagai ideologi negara, tidak hanya mencerminkan kompromi antara berbagai kelompok, tetapi juga menunjukkan dinamika state building yang melibatkan dialog intensif antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana musyawarah sebagai prinsip demokrasi tradisional Indonesia digunakan untuk menjembatani perbedaan ideologis, sehingga menghasilkan fondasi negara yang kokoh (Notonagoro, 1974). Dengan demikian, Notonagoro menekankan Pancasila sebagai



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

falsafah dasar yang inklusif, yang menurut penulis, merupakan wawasan brilian untuk menyatukan pluralitas Indonesia tanpa memaksakan satu pandangan. Pancasila merupakan dasar negara kita yang menjadi payung serta sumber hukum juga sumber inspirasi dalam kehidupan bernegara, terkadang dasar Negara (Arif, 2018).

Latar belakangnya berasal dari sidang BPUPKI yang diadakan oleh pemerintah Jepang pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana tokoh-tokoh nasional seperti Sukarno, Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo terlibat dalam perdebatan panas. Golongan kebangsaan, yang dipimpin oleh Sukarno, mendorong Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan sekuler, sementara golongan Islam menuntut pengakuan syariat Islam sebagai bagian integral. Negosiasi ini mencapai puncaknya dalam Piagam Jakarta, yang kemudian direvisi menjadi Pancasila final. (Yamin, 1959) sebagai saksi mata, menggambarkan negosiasi ini sebagai proses yang penuh ketegangan, namun menurut penulis, revisi Piagam Jakarta menunjukkan kompromi yang bijak untuk menjaga persatuan nasional di tengah ancaman disintegrasi.

Perbedaan dapat menyatukan suatu bangsa melalui keterikatan identitas nasional yang meliputi budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, "identitas" dan "nasional". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan kata "nasional" berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Pengertian identitas nasional secara etimologis lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain (Faslah, 2024).

Pancasila diakui sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia, sebuah hasil monumental dari proses musyawarah yang intens dan negosiasi politik yang luar biasa pada tahun 1945. Pembentukan ideologi ini merupakan inti dari tahap awal State Building Indonesia, di mana penentuan prinsip dasar negara menjadi syarat mutlak bagi eksistensi bangsa. Secara historis, kelahiran Pancasila tidak dapat dipisahkan dari pertemuan dan interaksi dua kekuatan politik dan ideologis utama: Golongan Kebangsaan dan Golongan Islam. Penelitian ini beranjak dari pandangan bahwa proses perumusan Pancasila adalah model ideal dari negosiasi ideologis dalam konteks pembentukan negara baru. "Jikalau bangsa Indonesia itu menghendaki supaya lima sila ini dijadikan tiga, yaitu Trisila, atau jikalau menghendaki supaya yang tiga ini dijadikan satu, yaitu Ekasila, ini berarti suatu proses musyawarah. Kita akan kembali kepada hasil pertama, yaitu Pancasila. Yang lima itu menjadi satu, yang satu itu menjadi lima." (Soekarno, 1945). Dengan begitu hal ini menekankan bahwa Pancasila adalah hasil musyawarah tertinggi, diterima oleh semua golongan, termasuk Golongan Islam dan Golongan Kebangsaan.

Diskursus kritis mengenai dasar negara terjadi secara eksplisit dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) hingga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pusat ketegangan terletak pada isu hubungan antara agama dan negara. Golongan Islam pada awalnya memperjuangkan dimasukkannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yang mencerminkan aspirasi keagamaan, sementara Golongan Kebangsaan menekankan perlunya landasan yang bersifat sekuler-nasionalis

untuk menjamin persatuan dan inklusivitas seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Dinamika ini mencapai klimaksnya pada momen krusial menjelang Proklamasi, di mana kepentingan mendesak untuk mendirikan negara yang diakui secara luas (State Building) berfungsi sebagai daya dorong utama untuk mencapai kompromi.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Adityo, 2022), penguatan pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara perlu terus dilakukan, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka memahami konteks historis dan filosofis lahirnya ideologi bangsa tersebut. Upaya ini penting karena Pancasila tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses dialektika dan kompromi politik yang mendalam di antara berbagai kelompok dalam sidang BPUPK dan PPKI. Dalam konteks tersebut, semangat musyawarah dan kesediaan untuk mencapai mufakat menjadi faktor utama yang memungkinkan tercapainya konsensus nasional tentang dasar negara, sebagaimana tercermin dalam proses pembentukan Piagam Jakarta hingga penetapan Pancasila sebagai ideologi final bangsa Indonesia.

Secara spesifik, studi ini akan menguji bagaimana semangat musyawarah mufakat, yang dijiwai oleh kepentingan State Building, mampu mengatasi perbedaan fundamental dan menghasilkan konsensus yang berkelanjutan. Pemahaman atas kompleksitas negosiasi ideologis tahun 1945 ini sangat penting untuk menafsirkan

Pembahasan

Sidang BPUPKI merupakan forum utama di mana musyawarah sebagai tradisi budaya Indonesia digunakan untuk membangun konsensus. Musyawarah, yang berarti "berembuk bersama", menjadi alat untuk mengatasi perbedaan ideologis di tengah keragaman etnis, agama, dan politik pasca-kolonialisme Jepang (Anderson, 1972).

karakter hakiki Pancasila sebagai ideologi inklusif dan fondasi kokoh bagi negara modern Indonesia. Menurut (Soepomo, 1945), dalam Pidato di BPUPKI "Maka musyawarah adalah cara yang sangat perlu untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan sesuatu yang benar-benar menjadi keinginan kita bersama. Negara kita berdasarkan atas musyawarah mufakat dan kekeluargaan." Dengan demikian, proses perumusan Pancasila pada tahun 1945 menunjukkan bahwa dasar negara ini harus dipandang sebagai dokumen State Building yang sangat berhasil, di mana musyawarah berfungsi sebagai perangkat politik utama untuk memitigasi risiko perpecahan ideologis.

Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia lebih dipahami sebagai kepribadian, yang tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakatnya. Jati diri bangsa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting sebagai identitas yang mencerminkan ciri khas bangsa. Kehilangan jati diri ini berarti kehilangan segalanya dan dapat mengakibatkan terhapusnya eksistensi bangsa Indonesia di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Pembelajaran sejarah berfungsi sebagai penguat jati diri bangsa, sejalan dengan tujuan pendidikan yang berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kesadaran budaya kepada para peserta didik. Indonesia, dengan segala keberagamannya, memiliki potensi yang beragam, baik yang positif maupun yang negative.

Perumusan Pancasila pada tahun 1945 harus dipahami sebagai proses State Building yang bertumpu pada musyawarah sebagai perangkat pengambilan keputusan. Dinamika persidangan di BPUPK (Mei-Juli 1945) hingga pengesahan di PPKI (Agustus 1945) adalah arena di mana terjadi benturan sekaligus penyatuan dua arus utama ideologi: Golongan Kebangsaan yang berorientasi pada negara kesatuan inklusif, dan Golongan Islam yang memiliki aspirasi negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pertemuan ini tidak menghasilkan dominasi ideologi, melainkan proses negosiasi ideologis yang cerdas, yang mencari titik temu (kalimatun sawa) demi kepentingan politik yang lebih besar.

Pada sidang pertama (29 Mei-1 Juni 1945), Sukarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, yang terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Usulan ini mencerminkan visi golongan kebangsaan, yang menekankan inklusivitas untuk menyatukan bangsa yang heterogen (Notonagoro, 1974).

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya sekadar menjadi simbol atau teori, tetapi juga pedoman hidup yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku ini hadir untuk mengungkapkan peran penting Pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa serta mengaktualisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Melalui kajian yang mendalam, buku ini membahas berbagai aspek dari Pendidikan Pancasila, termasuk penerapannya dalam dunia pendidikan tinggi, kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan pentingnya Pancasila dalam membangun kesadaran sejarah bangsa Indonesia. Pembaca juga akan diajak untuk memahami perjalanan sejarah perumusan Pancasila, serta bagaimana semangat kemerdekaan yang terkandung dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi fondasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Faslah, 2025).

Secara fundamental, Pancasila berfungsi sebagai kontrak sosial yang dihasilkan melalui kearifan musyawarah dalam situasi State Building yang penuh tantangan. Proses perumusannya pada tahun 1945 bukan hanya peristiwa historis, melainkan model manajemen konflik ideologis. Negosiasi ideologis antara Golongan Kebangsaan dan Golongan Islam yang mencapai klimaks pada penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta menghasilkan sebuah ideologi yang secara strategis mampu mengakomodasi pluralitas tanpa mengorbankan integritas negara. Keberhasilan ini menegaskan bahwa kepentingan mendesak untuk mendirikan negara yang diakui secara luas merupakan kekuatan pemersatu yang mengalahkan perbedaan doktrinal.

Titik balik paling signifikan dari negosiasi ideologis ini termanifestasi pada perubahan sila pertama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang merupakan kompromi awal antara kedua golongan, masih mencantumkan "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Teks ini mencerminkan keberhasilan Golongan Islam dalam memasukkan aspirasi mereka. Namun, menjelang 18 Agustus 1945, muncul keberatan serius dari perwakilan daerah non-Muslim, terutama Indonesia bagian timur, yang mengancam persatuan negara yang baru lahir. Di sinilah peran musyawarah mufakat, yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh kunci dari Golongan

Kebangsaan dan disikapi dengan bijaksana oleh wakil Golongan Islam, menjadi kunci keputusan untuk menghapus tujuh kata tersebut dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan bukti nyata bahwa kepentingan State Building yaitu menjaga keutuhan teritorial dan legitimasi negara baru diutamakan. Musyawarah berfungsi sebagai katup pengaman politik, yang memungkinkan para pendiri bangsa pragmatis dan visioner, meredam konflik ideologis demi konsensus nasional. Kepatuhan Golongan Islam terhadap hasil musyawarah ini, meskipun berarti mengorbankan tuntutan ideologis mereka, merupakan kontribusi terbesar terhadap fondasi persatuan. Dengan demikian, Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah simbol dari kearifan politik, menjadikannya ideologi yang mampu menaungi semua komponen bangsa dan memastikan kelangsungan hidup negara kesatuan.

Musyawarah sebagai mekanisme resolusi konflik. Proses ini melibatkan negosiasi ideologis yang fundamental antara Golongan Kebangsaan yang memprioritaskan persatuan nasional-inklusif, dan Golongan Islam yang memperjuangkan dimensi teokratis-religius yang termanifestasi dalam tujuh kata Piagam Jakarta. Ketegangan ini mencapai puncaknya menjelang 18 Agustus 1945, di mana kepentingan mendesak untuk mendirikan negara yang diakui dan utuh (State Building) menjadi daya dorong utama untuk kompromi. Keputusan Golongan Islam untuk menerima penghapusan tujuh kata tersebut, yang dicapai melalui semangat musyawarah mufakat, merupakan pengorbanan politik besar perumusan Pancasila adalah model ideal dari State Building yang dijalankan melalui yang menegaskan patriotisme mereka. Keputusan ini secara efektif meredam ancaman separatisme dan menghasilkan Pancasila sebagai ideologi inklusif. Bahkan, penelitian akademis di Indonesia menegaskan bahwa hasil akhir ini tidak sepenuhnya menghilangkan nilai-nilai religius. Hal ini membuktikan bahwa musyawarah adalah instrumen politik yang unggul dalam mengelola pluralitas demi fondasi kokoh negara modern Indonesia.

Di sisi lain, golongan Islam, yang diwakili oleh tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Muhammad Yamin, menuntut agar Islam menjadi dasar negara. Mereka mengusulkan "Negara Islam" atau setidaknya pengakuan syariat Islam dalam konstitusi. Perdebatan ini menunjukkan ketegangan ideologis: golongan kebangsaan melihat Pancasila sebagai jembatan untuk menghindari dominasi satu agama, sementara golongan Islam khawatir bahwa sekularisme akan mengabaikan nilai-nilai Islam (Yamin, 1959).

Kepatuhan Golongan Islam terhadap hasil musyawarah mufakat, meskipun menyiratkan pengorbanan ideologis, merupakan fondasi etika politik yang mendasari kohesi nasional. Pancasila oleh karenanya, berdiri tegak sebagai manifestasi dari kemampuan bangsa Indonesia untuk mentransformasi perselisihan menjadi konsensus. Hal ini diperkuat oleh temuan akademik dari Repository UIN Malang, yang menyatakan bahwa ini mengindikasikan bahwa kompromi politik para pendiri bangsa adalah refleksi langsung dari kebutuhan bangsa untuk menjadi bangsa yang terintegrasi dan harmonis. Dengan demikian, musyawarah adalah strategi State Building yang vital, yang berhasil mengubah pertentangan ideologis menjadi konsensus dasar negara. Pancasila adalah puncak dari kearifan politik pendiri bangsa, memastikan bahwa negara Indonesia berdiri di atas landasan yang kokoh dan inklusif. Topik ini memiliki potensi besar untuk

menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana keragaman Indonesia dikelola secara efektif pada momen pendirian negara, menjadikannya pelajaran abadi bagi demokrasi konsensus.

Golongan Islam dalam perumusan Pancasila adalah sentral bagi pemahaman negosiasi ideologis dan keberhasilan State Building Indonesia. Awalnya, Golongan Islam melalui tokoh-tokohnya di BPUPK dan Panitia Sembilan, secara konsisten memperjuangkan dasar negara yang memasukkan prinsip-prinsip Islam, yang kemudian terwujud dalam rumusan Piagam Jakarta, khususnya klausul "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Tuntutan ini merupakan manifestasi legitimasi historis dan dukungan sosial-politik yang kuat dari umat Islam yang sejak lama terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, Piagam Jakarta menjadi bukti keberhasilan awal Golongan Islam dalam menyalurkan aspirasi ideologisnya melalui musyawarah.

Negosiasi ideologis mencapai klimaks dalam sidang kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945), di mana komite sembilan terdiri dari Sukarno, Hatta, dan perwakilan golongan Islam merumuskan Piagam Jakarta. Piagam ini awalnya menyertakan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada sila pertama, sebagai kompromi untuk golongan Islam (Reid, 1974).

Namun, negosiasi ini tidak berjalan mulus. Golongan kebangsaan, khususnya Hatta, menekankan bahwa pengakuan syariat Islam akan menimbulkan perpecahan, terutama dengan minoritas non-Muslim seperti Kristen dan Hindu. Di sisi lain, golongan Islam melihat ini sebagai minimum untuk melindungi hak umat Islam. Musyawarah intensif terjadi, di mana argumen-argumen saling bertukar: Sukarno menekankan persatuan nasional, sementara Hadikusumo menegaskan bahwa Islam adalah mayoritas dan harus diakui (Dokumen Sidang BPUPKI. Arsip Nasional Republik Indonesia, n.d.).

Titik balik paling signifikan terjadi pada 18 Agustus 1945. Meskipun terdapat penolakan dari Golongan Kebangsaan yang didukung oleh perwakilan dari Indonesia Timur yang non-Muslim, keputusan akhir untuk menghapus tujuh kata tersebut tercapai karena kearifan politik Golongan Islam. Dalam semangat musyawarah mufakat, para pemimpin Islam menerima perubahan tersebut demi kepentingan State Building yang lebih besar: menghindari perpecahan segera dan menjamin persatuan nasional di tengah proklamasi kedaulatan yang rapuh. Tindakan ini merupakan pengorbanan ideologis tertinggi dan strategis, yang menegaskan bahwa kesetiaan terhadap negara kesatuan dan keutuhan bangsa diletakkan di atas kepentingan doktrinal kelompok.

Dengan demikian, peran Golongan Islam bukan hanya sebagai pihak yang bernegosiasi, tetapi sebagai penjamin konsensus nasional yang memungkinkan Pancasila menjadi ideologi yang inklusif dan diterima oleh seluruh komponen bangsa. "Keputusan untuk menghapus tujuh kata dari Piagam Jakarta merupakan kompromi politik yang luar biasa dari pihak Golongan Islam. Tindakan ini menunjukkan sikap kenegarawanan dan pengakuan terhadap pentingnya persatuan nasional di atas kepentingan golongan. Tanpa kompromi ini, State Building Indonesia akan terancam pecah pada hari pertamanya." (Ma'arif, 2010). Peran Golongan Islam dalam proses negosiasi ideologis dan perumusan Pancasila adalah kunci utama bagi keberhasilan

State Building Indonesia. Keputusan tokoh Islam untuk menerima penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta yang dicapai melalui musyawarah mufakat merupakan tindakan kenegarawanan dan pengorbanan ideologis tertinggi. Keputusan ini menunjukkan adanya transformasi ideologis dari tuntutan sektoral menuju prioritas nasional yang universal. Dengan mendahulukan kepentingan State Building (persatuan dan keutuhan negara) di atas kepentingan golongan, Golongan Islam tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memastikan Pancasila memiliki legitimasi dan kekuatan mengikat di seluruh wilayah Indonesia yang sangat majemuk.

Negosiasi Ideologis merupakan inti dari proses perumusan Pancasila yang menjadikannya fondasi kokoh bagi State Building Indonesia. Negosiasi ini bukan sekadar tawar-menawar politik, melainkan pertarungan gagasan fundamental mengenai karakteristik dasar negara: apakah akan menjadi negara sekuler-nasionalis, teokratis, atau kompromi keduanya. Arena utama negosiasi ideologis ini melibatkan dua kutub, yaitu Golongan Kebangsaan yang diwakili oleh tokoh-tokoh yang menekankan persatuan di atas identitas agama, dan Golongan Islam yang memperjuangkan dimensi keagamaan yang lebih eksplisit.

Fase kritis negosiasi ideologis terlihat jelas dalam episode Piagam Jakarta, di mana kompromi awal menghasilkan sila pertama yang mensyaratkan kewajiban syariat bagi pemeluknya. Namun, tekanan dari kepentingan State Building yang mendesak yaitu kebutuhan akan pengakuan universal dan pencegahan disintegrasi akhirnya mengarahkan negosiasi ini menuju konsensus yang lebih inklusif. Melalui mekanisme musyawarah yang berlandaskan kearifan, Golongan Islam menyetujui penghapusan tujuh kata tersebut. Hal ini membuktikan bahwa negosiasi ideologis berhasil bertransformasi dari pertentangan prinsip menjadi kompromi kenegarawanan, mengokohkan Pancasila sebagai ideologi yang bersifat universalis-nasional, yang mampu mengakomodasi tanpa mendominasi. "Pancasila adalah buah dari pertarungan gagasan antara ideologi Islam dan ideologi kebangsaan-sekuler yang ada di BPUPKI dan PPKI. Negosiasi ideologis ini berhasil dikompromikan karena kesadaran para pendiri bangsa, termasuk Golongan Islam dan Golongan Kebangsaan, untuk menempatkan kesatuan negara di atas kepentingan ideologi demi menyambut proklamasi." (Anwar, 2012).

Negosiasi Ideologis adalah jantung dan penentu utama keberhasilan State Building Indonesia. Proses ini bukan sekadar perdebatan, melainkan pertarungan gagasan fundamental antara cita-cita negara sekuler-nasionalis dari Golongan Kebangsaan melawan tuntutan negara berprinsip agama dari Golongan Islam. Keberhasilan negosiasi ini yang dimediasi melalui mekanisme musyawarah terletak pada kemampuan para pendiri bangsa untuk melakukan transformasi politik, menempatkan persatuan nasional di atas tuntutan ideologi kelompok. Hasilnya, Pancasila muncul sebagai titik temu (kalimatun sawa) universal yang secara strategis menjamin legitimasi dan stabilitas negara baru. Dengan demikian, Negosiasi Ideologis membuktikan bahwa kompromi politik adalah prasyarat mutlak bagi fondasi negara yang kokoh dan majemuk.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan penelitian ini menyoroti bahwa kelahiran Pancasila adalah hasil dari dinamika musyawarah yang bertindak sebagai mekanisme politik paling efektif untuk State Building Indonesia. Proses perumusannya pada 1945 didominasi oleh negosiasi ideologis sengit antara Golongan Kebangsaan dan Golongan Islam. Musyawarah terbukti berhasil mengubah potensi perpecahan yang timbul dari isu tujuh kata Piagam Jakarta menjadi konsensus nasional yang kuat. Keberhasilan utama terletak pada sikap kenegarawanan para pemimpin Golongan Islam yang, melalui pengorbanan ideologis tertinggi, menerima penghapusan tujuh kata tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahwa kepentingan State Building yakni menjamin persatuan dan legitimasi negara lebih diutamakan daripada kepentingan doktrinal kelompok. Oleh karena itu, Pancasila melampaui status dasar filosofis; ia adalah dokumen kompromi politik tertinggi dan kontrak sosial yang memastikan inklusivitas dan stabilitas negara multikultural sejak awal kemerdekaan.

Berdasarkan temuan mengenai peran sentral musyawarah dalam menyelesaikan negosiasi ideologis, diajukan beberapa rekomendasi. Pertama, dalam konteks pendidikan dan kebijakan publik, penting untuk menekankan narasi sejarah yang utuh, menyoroti peran kunci Golongan Islam dan Golongan Kebangsaan dalam mencapai kompromi, guna menjadikan Pancasila sebagai model demokrasi konsensus. Kedua, secara kelembagaan, mekanisme musyawarah harus terus diaktifkan dalam proses pengambilan keputusan politik nasional sebagai perlawanan terhadap praktik politik mayoritarian yang berpotensi memecah belah. Musyawarah harus diposisikan sebagai strategi State Building jangka panjang untuk merespons konflik sosiopolitik kontemporer. Ketiga, untuk pengembangan akademik, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas kajian mengenai bagaimana Pancasila sebagai hasil negosiasi ideologis tetap berfungsi sebagai titik temu dalam menghadapi tantangan ideologi global, serta bagaimana negara-negara majemuk lainnya dapat mengadopsi prinsip musyawarah Indonesia untuk memperkuat fondasi negara mereka.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2022). Penguatan dasar negara melalui penyuluhan Pancasila pada mahasiswa. *Devosi*, 3(2), 1–5. <https://repository.uin-malang.ac.id/11455/>
- Anderson, B. (2006). *Java in a time of revolution: Occupation and resistance, 1944-1946*. Equinox Publishing.
- Anwar, R. (2012). *Pancasila: Negosiasi ideologis antara Islam dan kebangsaan*. Penerbit Republika.
- Dokumen Sidang BPUPKI. Arsip Nasional Republik Indonesia*. (n.d.).
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- Faslah, R. (2025). *Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa*. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Ma'arif, A. S. (2010). *Islam dan Pancasila: Kompromi politik dalam state building Indonesia*. Penerbit LKIS.

- Notonagoro, S. H. (1974). Pantjasila, dasar falsafah negara Republik Indonesia: Kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang Pancasila. (No Title).
- Reid, A. (1974). The Indonesian national revolution, 1945-1950. (No Title).
- Soekarno. (1945). *Pidato di Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Arsip Nasional Republik Indonesia.*
- Soepomo. (1945). *Pidato di Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Arsip Nasional Republik Indonesia.*
- Yamin, H. M. (1959). Naskah-persiapan undang-undang dasar 1945. (No Title).